

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH  
TANGGA YANG BEKERJA MELALUI LEMBAGA  
PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA**



**Oleh**

**NOR AINAH**

**NIM. 2120215320043**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
RUMAH TANGGA YANG BEKERJA MELALUI  
LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:  
NOR AINAH  
NIM. 2120215320043**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
RUMAH TANGGA YANG BEKERJA MELALUI LEMBAGA  
PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA**

**Nama : NOR AINAH  
NIM : 2120215320043**

**Disetujui,  
Komisi Pendamping**

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. Sapruudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.HUM.  
NIP. 196907161994032002**

  
**Ketua Program Studi  
Program Magister Hukum**

**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui,**

  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**

**Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal .....**

Pembimbing Utama



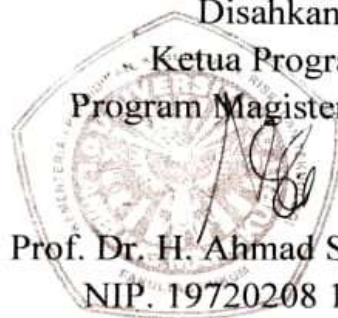
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.HUM.  
NIP. 196907161994032002

Disahkan Oleh  
Ketua Program Studi  
Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 19 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
2. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
3. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.,

**TESIS INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK  
KEDUA ORANG TUA SAYA**

**BAPAK SAINI ERWIN DAN IBU MASDINAH  
ADIK KANDUNG SAYA  
MUHAMMAD FAKHRI**

**SERTA**

**KARENA MEREKA YANG SELALU MENDOAKAN, MEMBERI  
NASIHAT, SERTA MEMBERI DUKUNGAN DALAM HIDUP SAYA INI  
TANPA MEREKA SAYA TIDAK AKAN MENJADI INDIVIDU SEPERTI  
SEKARANG INI  
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Ainah

NIM : 2120215320043

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature and the name 'Nor Ainah'. The stamp includes the text 'SEPUAN RUPIAH 10000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code '06EDDALX242825671'.

NIM. 2120215320043

**AINAH, NOR, 2024, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA MELALUI LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA, Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.HUM. 100 Halaman**

## **RINGKASAN**

Sebagai pihak swasta yang menjual jasa, penyalur pekerja rumah tangga tentunya lebih mendahulukan kepentingan pengguna jasa yang merupakan sumber pendapatan, akan tetapi yang menjadi masalah utama adalah lembaga sebagai penyalur pekerja rumah tangga tersebut sering kali belum memiliki izin, sehingga dalam hal ini merugikan pekerja rumah tangga dan majikan yang memakai jasa tersebut, seperti halnya lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang bernama Yayasan Val The Consultant Indonesia yang tidak memiliki izin padahal sudah beroperasi sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan banyak masyarakat yang menggunakan jasa pekerja rumah tangga dari lembaga penyalur pekerja rumah tangga Yayasan Val The Consultant Indonesia tersebut. Perizinan pun telah dilakukan verifikasi dokumen pada Januari 2024. Tim Kemnaker didampingi perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melakukan verifikasi lapangan pada 28 Februari 2024 sampai 1 Maret 2024. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, masih terdapat kekurangan dokumen yang harus diperbaiki, salah satunya belum dicantumkannya kode KBLI 78103 dalam Akta Pendirian. Izin pun tidak dapat diterbitkan sebelum Akta Pendirian diubah, serta dokumen lainnya yang belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Izin dapat diterbitkan apabila kekurangan dokumen dapat dilengkapi. Dengan adanya lembaga penyalur pekerja rumah tangga, maka menimbulkan adanya 3 pihak terkait hubungan kerja yaitu antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja, perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan penyedia pekerjaan, dan juga perusahaan penyedia pekerjaan dengan pekerja. Hal ini akan menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda pula dengan sistem ketenagakerjaan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai perlindungan pekerja yang menjadi tanggungjawab lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Peraturan Pemerintah tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah tersebut telah menentukan pekerja rumah tangga tersebut pada dasarnya merupakan karyawan dari lembaga penyalur. Mereka pun digaji oleh lembaga penyalur, dimana pemenuhan hak dan semua perlindungan pekerja kepada lembaga penyalur, dan dapat dialihkan hak-hak pekerja apabila melakukan pergantian lembaga penyalur tetapi selama objek pekerjaan tersebut masih ada. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut tidak berjalan lancar serta terdapat kekurangan dan kendala.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini disusun menggunakan tipe penelitian kualitatif Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini didukung dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji dalam aspek sosial sehingga mampu mendeskripsikan, merelasikan, menguji, dan mengkritik terkait bagaimana hukum positif bekerja di tengah masyarakat tertentu. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, hubungan hukum antara lembaga penyalur pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, dan pengguna dalam kasus ini memenuhi definisi alih daya. Yayasan Val The Consultant bertindak sebagai pengguna, pekerja rumah tangga sebagai penerima kerja alih daya, dan orang tua anak sebagai pengguna. Lembaga penyalur pekerja rumah tangga seperti Yayasan Val The Consultant Indonesia yang tidak memiliki izin operasional menjadikan pertanggungjawaban perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat menjadi terabaikan. **Kedua**, Sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang tidak memiliki izin operasional yaitu sanksi sesuai dengan berdasarkan Pasal 515 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan usaha, dan apabila perusahaan alih daya tersebut dikenakan sanksi administratif, pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya yang bersangkutan. Namun penegakan sanksi terhadap lembaga penyalur pekerja rumah tangga tidak berizin di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan.

**AINAH, NOR, 2024, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA MELALUI LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA**, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.HUM.**  
100 Halaman

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Lembaga Penyalur

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis hubungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dengan lembaga penyalur tenaga kerja pekerja rumah tangga dan majikan serta menganalisis implementasi sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang tidak memiliki izin operasional.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini disusun menggunakan tipe penelitian kualitatif Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini didukung dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji dalam aspek sosial sehingga mampu mendeskripsikan, merelasikan, menguji, dan mengkritik terkait bagaimana hukum positif bekerja di tengah masyarakat tertentu. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, hubungan hukum antara lembaga penyalur pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, dan pengguna dalam kasus ini memenuhi definisi alih daya. Yayasan Val The Consultant bertindak sebagai pengguna, pekerja rumah tangga sebagai penerima kerja alih daya, dan orang tua anak sebagai pengguna. Lembaga penyalur pekerja rumah tangga seperti Yayasan Val The Consultant Indonesia yang tidak memiliki izin operasional menjadikan pertanggungjawaban perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat menjadi terabaikan. *Kedua*, Sanksi bagi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang tidak memiliki izin operasional yaitu sanksi sesuai dengan berdasarkan Pasal 515 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan usaha, dan apabila perusahaan alih daya tersebut dikenakan sanksi administratif, pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya yang bersangkutan. Namun penegakan sanksi terhadap lembaga penyalur pekerja rumah tangga tidak berizin di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan.

**AINAH, NOR, 2024, LEGAL PROTECTION FOR DOMESTIC WORKERS WHO WORK THROUGH DOMESTIC WORKER PLACEMENT AGENCIES**, Master Science of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor I: **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, dan Advisor II: **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.HUM.**. 100 page

### **ABSTRACT**

*Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Distribution Agencies*

*The aim of this research is to analyze the legal relationship between domestic workers, domestic worker placement agencies, and employers, as well as to analyze the implementation of sanctions for domestic worker placement agencies that do not possess operational permits.*

*In writing this thesis, the author employs a normative legal research approach. This research is designed using a qualitative research type and utilizes a statute approach. Additionally, this research is supported by a socio-legal approach that examines social aspects, enabling the description, relation, examination, and critique of how positive law functions within a particular society. Legal materials, including primary and secondary legal sources, are obtained through library research. The processing and analysis of legal materials are conducted through inventory and identification.*

*The research findings indicate, **First**, between the domestic worker placement agency, the domestic worker, and the user in this case meets the definition of outsourcing. The Val The Consultant Foundation acts as the user, the domestic worker as the outsourced worker, and the child's parents as the client. Domestic worker placement agencies like Yayasan Val The Consultant Indonesia, which do not have operating permits, can lead to the neglect of legal protection responsibilities for domestic workers. **Second**, sanctions for domestic worker placement agencies that do not have operating permits, as per Article 515 paragraph (1) and paragraph (2) of Government Regulation Number 5 of 2021, will be subject to administrative sanctions in the form of written warnings and/or temporary suspension of business activities. If the outsourcing company is subject to administrative sanctions, the fulfillment of workers'/laborers' rights remains the responsibility of the outsourcing company concerned. However, the enforcement of sanctions against unlicensed domestic worker placement agencies in Indonesia still faces several obstacles.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga.

Diselesaikannya penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.
5. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.HUM. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis Tesis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.
6. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik.
7. Para Dosen penguji yang telah berkenanan hadir mulai dari usulan penelitian Tesis ini sampai ujian Tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.
9. Seluruh karyawan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
10. Kedua Orang tua penulis Bapak Saini Erwin dan Ibu Masdinah serta saudara penulis Muhammad Fakhri yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis tiada hentinya.

11. Muhammad Alfin Rayhan, S.H. *partner of my life* yang membuat penulis mengerti bahwa Allah telah merajut cerita terindah jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan.
12. Sahabat Penulis yang telah menemani dalam keadaan baik dan buruknya penulis yang kini mereka telah menempuh dan menikmati cerita berbeda di kehidupan masing-masing.
13. Bapak Setya Bhekti, S.H. dan Bapak Fredy Adi Candra (Alm) selaku atasan Subkon Internal PT. Dutabahari Menara Line Dockyard yang memberikan dukungan dan kepercayaan dalam melanjutkan pendidikan serta telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis bekerja.
14. Seluruh karyawan Subkon Internal PT. Dutabahari Menara Line Dockyard yang telah memberikan pengalaman berharga dalam karir penulis.
15. Seluruh Mahasiswa Program Kekhususan Ekonomi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas cerita yang singkat namun berkesan selama penulis menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan keberlimpahan rahmat serta pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini sampai selesai. Mohon maaf pada keseluruhan dan mohon ampun kepada Ilahi atas kekurangan dan segala kekeliruan. Hasil penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir Kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 20 Juli 2024

Penulis,

Nor Ainah

NIM. 2120215320043

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang Masalah.....	08
B. Rumusan Masalah.....	08
C. Keaslian Penelitian.....	08
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II HUBUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PENGGUNA....	46
A. Hubungan Kerja dalam Perspektif Perdata dan Ketenagakerjaan .....	46
B. Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dengan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Pekerja Rumah Tangga dan Majikan.....	57
BAB III IMPLEMENTASI SANKSI BAGI LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL.....	70
A. Dasar Hukum Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Tidak Memiliki Izin Operasional .....	70
B. Sanksi Yayasan Val The Consultant Indonesia Tidak Memiliki Izin.....	76
BAB VI PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Komparasi Hubungan Alih Daya Peraturan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia .....	57